

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Perubahan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA) tahun 2019;
3. Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Daerah Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kotawaringin Barat, Lembaran Berita Daerah Nomor 21 Tahun 2019 Di Undangkan Tanggal 19 Agustus Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2017, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA) Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat, Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan
Pada bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Perubahan serta sistematika penulisan Renja;

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017

Pada Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2017 dan capaian Renstra tahun Renstra tahun 2012 - 2016 dan Renstra tahun 2017-2022, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Pada bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi serta Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang memuat rekap Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif;

BAB IV : Penutup

Pada bab ini memuat cacatan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017

Pada pelaksanaannya tidak semua realisasi program/kegiatan dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Belum tercapainya realisasi program/kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan karena adanya perubahan anggaran sehingga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga hal ini mempengaruhi target/kinerja yang telah dilaksanakan. Dalam tabel dibawah ditetapkan ukuran keberhasilan Renja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2017.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1. Program Administrasi Perkantoran

Anggaran dana untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.108.809.800,- terealisasi Rp. 966.477.678,-. Dengan prosentase pencapaian realisasi keuangan sebesar 87.16%, sedangkan realisasi fisiknya 99.55 %. Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	100 %	0%	0 %
	- Pengiriman surat	10	0	
	- Software e surat	1	0	
	- Perangko	80	0	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	98 %	85,51 %
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, terdiri atas :	100 %	100 %	89,39 %
	- Kendaraan Dinas Roda 4	2 unit	2 unit	
	- Kendaraan Dinas Roda 2	22 unit	22 unit	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 tahun	100 %	100 %	78,24 %
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100 %	100 %	95,03%
	Terdiri atas :			
	- Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	1 orang	1 orang	
	- Pembayaran Jasa Tukang Kebun	1 orang	1 orang	
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	100%	69,13%
	Terdiri atas :			
	- Perbaikan Jaringan	12 bulan	12 bulan	
	- Perbaikan komputer	15 unit	15 unit	

	-Perbaikan Laptop - Perbaikan Printer	6 unit 6 unit	6 unit 6 unit	
7	Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan	100 %	100 %	98,93 %
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terdiri atas : - Cetak amplop dinas ukuran A kop BK, Setda dan Bupati - Cetak amplop dinas ukuran C kop BK, Setda dan Bupati - Cetak amplop dinas ukuran E kop BK, Setda dan Bupati - Buku NCR -ID Card	100 % 90 pak 30 pak 30 pak 40 buah 45 buah	100 % 90 pak 30 pak 30 pak 40 buah 45 buah	79,02 %
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan -LED 5-8 watt -LED 8-10 watt -LED 10-15 watt -Baterai A -Baterai AA -Baterai Besar	100 % 16 buah 24 buah 24 buah 10 pak 6 pak 6 pak	100 % 16 buah 24 buah 24 buah 10 pak 6 pak 6 pak	99,67%
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terdiri atas : - Printer All in One - Scanner - Kamera DSLR	100 % 4 unit 2 unit 2 unit	100% 4 unit 2 unit 1 unit	97,82 %
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	100 %	94,19%
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 buku	100 %	0 buku	0%
13	Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan	12 bulan	12 bulan	80,94 %
14	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	95,02 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran untuk Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur sebesar Rp. 776.459.300,- terealisasi Rp. 687.609.100,-. Prosentase pencapaian realisasi keuangan sebesar 88.56 %, sedangkan realisasi fisiknya 93.45 %.

Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Karpet CAT	100 % 58 meter	100% 58 meter	99,14%

	- Gorden kantor, aula, CAT	160 meter2	160 meter2	
2	Pengadaan Mebeleur - Meja Printer - Kursi Lipat	100 % 12 unit 80 unit	100 % 12 unit 80 unit	99 %
3.	Pengadaan peralatan gedung kantor - Ventilator ruangan	100 % 4 unit	100 % 4 unit	95,97 %
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan pagar gedung kantor	100 % 333.63 m2	0% 0 m2	0 %
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terdiri atas : - BBM/pelumas Kendaraan Dinas Roda 4 - BBM/pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 - Pembelian suku cadang R4 - Pemeliharaan kendaraan R4 - Pemeliharaan kendaraan R2	100 % 2 unit 19 unit 2 unit 2 unit 19 unit	90% 2 unit 19 unit 2 unit 2 unit 19 unit	64,91 %
6	Pemeliharaan peralatan gedung kantor - AC - Genset	100% 22 unit 923 liter	95% 22 unit 923 liter	92,18 %
7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Perencanaan Teknis - Pengawasan Teknis - Rehab tempat Parkir - Rehab Interior dan Eksterior Gdg Kantor & Aula	100% 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	100% 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	99,76 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 53.800.000,- terealisasi Rp. 44.440.000,-. Prosentase pencapaian realisasi keuangan 82.60 % sedangkan realisasi fisiknya 100 %.

Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Pengadaan Pakaian Dinas	100 %	100 %	82,60%
	- Pengadaan Pakaian Dinas Harian	90 stel	90 stel	
	- Pengadaan Pakaian Satpam	2 stel	2 stel	
	- Pengadaan Pakaian Penjaga Malam	2 stel	2 stel	
	- Pengadaan Pakaian CS	2 stel	2 stel	
	- Pengadaan Pakaian Caraka	12 stel	12 stel	
	-Pengadaan Pakaian Tukang Kebun	2 stel	2 stel	

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 104.000.000,- terealisasi Rp. 71.228.204,-. Prosentase pencapaian realisasi keuangan 68.49 % sedang realisasi fisiknya 80 %.

Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	100 %	80%	
	- Perjalanan dinas	10 Org	7 Org	68,49 %
	- Kontribusi Bimtek	11 Org	7 Org	

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Anggaran untuk Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sebesar Rp. 17.620.000,- terealisasi Rp. 17.570.000,-. Prosentase pencapaian realisasi keuangan 99,72 % sedang realisasi fisiknya 100 %

Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD Jumlah buku	100 % 40	100 % 40	99,29 %
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah buku	100 % 12	100 % 12	100%
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah buku	100 % 12	100 % 12	99,98%

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 1.649.962.000,- terealisasi Sebesar Rp. 1.276.790.149,-. Prosentase pencapaian realisasi keuangan 77,38 % sedangkan realisasi fisiknya 84,44 %.

Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Terlaksananya diklat prajabatan Terdiri atas : Gol II Gol III	100 % 26 3	60% 0 0	24,40%
2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Terdiri atas : Pelaksanaan Diklatpim IV Pengiriman peserta Diklatpim III	100 % 10 5	80% 10 5	72,83%
3	Pendidikan dan pelatihan Tugas dan fungsi Terdiri atas : Bimtek kepegawaian Siraman rohani Purna Tugas	100 % 1 kegiatan 7 Kegiatan 2 kegiatan	90% 1 kegiatan 7 Kegiatan 2 kegiatan	84,35 %
4	Pendidikan dan pelatihan fungsional Terdiri atas : Rakor kepegawaian	100 % 1 kegiatan	75% 1 kegiatan	61,73%

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Anggaran untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sebesar Rp. 2.856.062.900,- terealisasi Rp. 1.944.683.650,-. Prosentase pencapaian realisasi keuangan 68.09%, sedangkan realisasi fisiknya 77.17 %.

Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Penyusunan rencana pembinaan karir Terdiri atas : - Pelantikan Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan strukturalbat Struktural - Rapat Baperjakat - Rapat Tim Pansel - Rapat Assesment	100 % 2 Keg 10 Keg 10 Keg 2 Keg	75% 1 Keg 4 Keg 6 Keg 2 Keg	55,66%
2	Seleksi Penerimaan CPNS Terdiri atas : - Pengadaan CPNS dan Penetapan NIP Th 2017 - Formasi dan usulan PNS Th 2017 - Pembekalan CPNS	100 % 27 orang 1 orang 1 orang	40% 27 orang 1 orang 1 orang	28,99%
3	Penempatan PNS Terdiri atas : - Keputusan Mutasi ASN	100 % 100	46,20% 1061	28,99 %
4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS Terdiri atas : - Keputusan kenaikan pangkat PNS - Keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS - Keputusan Pencantuman gelar - Keputusan Peninjauan Masa Kerja	100 % 1000 90 15 15	80% 504 91 19 1	78%
5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian Terdiri atas : - Layanan Informasi ASN	100 % 12 bulan	85% 12 bulan	83,11%
6	Seleksi dan Penempatan PNS untuk Tugas Belajar Seleksi Tugas belajar	100 % 205 orang	92% 204 orang	91,41%
7	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi Melalui : - Pemberian piagam Satyalencana Karya Satya - Penyelesaian Taspen - Penyelesaian Karpeg - Penyelesaian Karsu/Karis - Penyelesaian UKP Pengabdian dan pensiun - Sumpah Janji PNS	100 % 100 orang 100 orang 150 orang 250 orang 100 orang 200 orang	95.00% 170 orang 4 orang 98 orang 30 orang 119 orang 288 orang	93,98%
8	Proses penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Jumlah kasus PNS yang di proses	100 % 20 kasus	70% 8 kasus	63,28 %

9	Pemberian bantuan tubel dan ikatan dinas Terdiri atas : - S1/S2/D3	100 % 24 orang	90 29 orang	87,99%
10	Pemberian Bantuan penyelenggaraan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN - Pendampingan Capra IPDN	100% 25 orang	83% 2 orang	82,45%
11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Monitoring	100 % 12 bulan	65% 12 bulan	60,99 %

Aspek Keuangan

1. Pagu Anggaran Murni

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Belanja Tidak Langsung	2.453.338.000	2.778.185.000	3.404.735.000	3.430.395.000	4.852.964.000
2	Belanja Langsung	5.741.356.000	7.398.776.000	7.050.135.000	5.940.579.000	4.781.694.000
	Jumlah	8.194.694.000	10.176.961.000	10.454.870.000	9.370.974.000	9.634.658.000

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 910/41/III/DPA-SKPD/PPKD/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Tahun Anggaran 2017, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh dana anggaran sebesar Rp.9.370.974.000,- .

2. Realisasi Penggunaan Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi Akhir Tahun	Prosentase
I.	Belanja Tidak Langsung	3.430.395.000	3.309.895.000	3.259.731.448	98.48 %
1	Belanja Pegawai	3.430.395.000	3.309.895.000	3.259.731.448	98.48 %
II.	Belanja Langsung	5.940.579.000	6.566.714.000	5.008.768.781	76.28 %
1	Belanja Pegawai	536.638.600	600.161.200	409.547.400	68.23%

2	Belanja Barang dan Jasa	4.943.540.400	5.269.952.800	3.912.051.581	74.23%
3	Belanja Modal	460.400.000	696.600.000	687.169.800	98.64 %
	Jumlah	9.370.974.000	9.876.609.000	8.268.500.229	83.72 %

Alokasi penggunaan anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat, alokasi Rp. 1.365.100,- realisasi keuangan 0 %, realisasi fisik 0%.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, alokasi anggaran Rp. 159.000.000,- realisasi keuangan 85.51 %, realisasi fisik 98 %.
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan perijinan kendaraan dinas/operasional alokasi Rp. 6.300.000,- realisasi keuangan 89.39 %, realisasi fisik 100 %.
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan alokasi Rp. 369.749.500,- realisasi keuangan 78.24 %, realisasi fisik 100 %.
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor alokasi Rp. 66.890.700,- realisasi keuangan 95.03 %, realisasi fisik 100%.
- 6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja alokasi Rp. 8.990.000,- realisasi keuangan 69.13 %, realisasi fisik 100 %.
- 7) Penyediaan alat tulis kantor alokasi Rp. 85.441.500,- realisasi keuangan 98.93 %, realisasi fisik 100 %.
- 8) Penyediaan barang cetak dan penggandaan alokasi Rp. 25.398.000,- realisasi keuangan 79.02 %, realisasi fisik 100 %.
- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor alokasi Rp. 9.230.000 realisasi keuangan 99,67%, realisasi fisik 100%.
- 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, alokasi Rp. 89.400.000,-, realisasi keuangan 97.82 %, realisasi fisik 100%.
- 11) Penyediaan peralatan rumah tangga alokasi Rp. 32.290.000, realisasi keuangan 94.19 %, realisasi fisik 100%.
- 12) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan alokasi Rp. 400.000,- realisasi keuangan 0.00 %, realisasi fisik 0%.
- 13) Penyediaan makanan dan minuman alokasi Rp. 54.355.000,- realisasi keuangan 80.19%, realisasi fisik 100%.
- 14) Rapat-rapat Kordinasi dan konsultasi ke luar daerah alokasi Rp. 200.000.000,- realisasi keuangan 95.02 % realisasi fisik 100 %.

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor alokasi Rp. 192.400.000,- realisasi keuangan 99.14 %, realisasi fisik 100 %.
- 2) Pengadaan peralatan gedung kantor alokasi Rp. 70.000.000,- realisasi keuangan 95.97 %, realisasi fisik 100 %.
- 3) Pengadaan mebeleur alokasi Rp. 5.400.000,- realisasi keuangan 99%, realisasi fisik 100%.
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor alokasi Rp. 36.960.000,- realisasi keuangan 0 %, realisasi fisik 0 %.
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional alokasi Rp. 127.600.000,- realisasi keuangan 64.91%, realisasi fisik 90%.
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor alokasi Rp. 23.099.300,- realisasi keuangan 92.18 %, realisasi fisik 95%.
- 8) Rehabilitasi Sedang/ berat Rumah gedung Kantor alokasi Rp. 321.000.000,- realisasi keuangan 99.76 % dan realisasi fisik 100%

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya alokasi Rp. 53.800.000,- realisasi keuangan 100%, realisasi fisik 100%.

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan alokasi Rp.104.000.000,- realisasi keuangan 68.49%, realisasi fisik 80%.

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD alokasi Rp. 5.650.000,- realisasi keuangan 99.29 %, realisasi fisik 100 %
- 1) Penyusunan Laporan keuangan semesteran alokasi Rp. 3.870.000,- realisasi keuangan 100%, realisasi fisik 100%.
- 2) Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun alokasi Rp. 8.100.000,- realisasi keuangan 99.88%, realisasi fisik 100%.

g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Diklat prajabatan bagi CPNSD alokasi Rp. 15.000.000,- realisasi keuangan 24.40 %, realisasi fisik 60%.
- 2) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah alokasi Rp. 717.925.000,- realisasi keuangan 72.83%, realisasi fisik 80%.
- 3) Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah alokasi Rp. 102.685.000,- realisasi keuangan 61.73 %, realisasi fisik 75 %.
- 4) Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD alokasi Rp. 814.352.000,- realisasi keuangan 84.35 % dan fisik mencapai 90 %

h. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- 1) Penyusunan rencana pembinaan karir PNS alokasi Rp 813.675.000,- realisasi keuangan 55.66%, realisasi fisik 75%.
- 2) Seleksi penerimaan CPNS alokasi Rp. 268.820.000,- realisasi keuangan 24.68%, realisasi fisik 40%.
- 3) Penempatan PNS alokasi Rp. 152.383.500,- realisasi keuangan 28.99%, realisasi fisik 46.20%.
- 4) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS alokasi Rp. 184.450.000,- realisasi keuangan 78%, realisasi fisik 80%.
- 5) Pembangunan sistem informasi kepegawaian daerah alokasi Rp. 96.830.000,- realisasi keuangan 83.11% realisasi fisik 85%.

- 6) Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar alokasi Rp. 45.750.000,- realisasi keuangan 91.41%, realisasi fisik 92%.
- 7) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi alokasi Rp. 159.125.000,- realisasi keuangan 93.98%, realisasi fisik 95%.
- 8) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS alokasi Rp. 72.150.000,- realisasi keuangan 63.58%, realisasi fisik 70%.
- 9) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas alokasi Rp. 999.550.000,- realisasi keuangan 87.99% realisasi fisik 90%.
- 10) Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN alokasi Rp. 8.500.000,- realisasi keuangan 82.45 %, realisasi fisik 83 % .
- 11) Monitoring, evaluasi dan pelaporan alokasi Rp.54.829.400,- realisasi keuangan 60.99 %, realisasi fisik 65 %.

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1. Tugas Pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan :

- a. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lembaga daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- b. Membantu Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam seluruh tahapan proses manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pegawai, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2. Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan :

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang Kepegawaian.
2. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian daerah.
3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian daerah.
4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

5. Pelayanan administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional.
6. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Pengelolaan Sistem Informasi ASN Daerah.
9. Penyampaian Informasi ASN Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
10. Penyelenggaraan Administrasi KORPRI Kab. Kotawaringin Barat.

Sesuai tupoksi yang harus dijalankan berkenaan dengan pelaksanaan manajemen kepegawaian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kobar antara lain diawali dari perencanaan kebutuhan, penempatan, promosi, kesejahteraan, peningkatan kualitas/profesionalisme aparatur PNS dan pemberhentiannya tidak dapat dipungkiri bahwa upaya dan hasil yang diperoleh masih perlu dikaji dan dikembangkan secara berlanjut, berkesinambungan, bersinergi dan yang tidak kalah penting adanya komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang didukung dengan kebijakan umum mengacu pada ketentuan.

Berdasarkan capaian yang selama ini dilaksanakan masih banyak hal yang perlu dilakukan yang akan menjadi visi, misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ke depan dalam rangka tindak lanjut visi, misi yang belum tercapai secara optimal, dengan masih adanya isu-isu strategis yang perlu disikapi menyangkut pelaksanaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

a. Isu Lingkungan

Isu yang muncul pada isu lingkungan merupakan indikasi kurang profesionalnya ASN dalam melayani masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Isu-isu yang teridentifikasi adalah:

1. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih kurang memuaskan;
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi manajemen kepegawaian belum optimal.

b. Isu Kelembagaan

Isu yang muncul pada isu kelembagaan terkait dengan kapasitas sumber daya manusia di kepegawaian yang belum optimal. Isu-isu yang teridentifikasi adalah:

1. Perlunya penguatan pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi SDM tenaga teknis bidang kepegawaian;
2. Perlunya penguatan kapasitas Aparatur bidang kepegawaian.

c. Isu Infrastruktur

Isu infrastruktur terkait belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan manajemen kepegawaian. Isu-isu yang teridentifikasi adalah:

1. Perlunya komitmen bagi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pola pengawasan bagi ASN belum diimbangi dengan reward yang memiliki standar;

d. Isu Kompetensi Jabatan

Isu ini muncul dikarenakan untuk mewujudkan ASN yang profesional serta bermartabat dirasakan masih terjadi kebijakan yang belum mendorong kinerja ASN. Isu-isu yang teridentifikasi adalah :

1. Penyelenggaraan lelang jabatan terbuka.
2. Pelatihan Teknis ASN yang masih belum dioptimalkan.
3. Penanganan pelanggaran disiplin ASN dirasakan masih belum optimal.

Berkaitan dengan isu-isu penting tersebut permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah

1. Keterbatasan pagu anggaran yang ditetapkan cenderung menurun tiap tahun berdampak tidak optimalnya pelaksanaan tupoksi yang disusun dalam Renja Perubahan dan RENSTRA khususnya dalam rangka mewujudkan profesionalisme aparatur melalui program diklat teknis fungsional.
2. Pengembangan Karier pada pegawai belum sepenuhnya mengacu pada kompetensi
3. Meningkatnya pengajuan mutasi antar wilayah se-Kabupaten Kotawaringin Barat maupun antar daerah perlu ditunjang oleh semua jajaran dalam rangka tetap terpenuhinya kebutuhan sesuai analisa dan pertimbangan untuk persetujuan.
4. Kebijakan mutasi pindah antar daerah yang selama ini tidak memenuhi ketentuan prosedur yang menyulitkan bagi pengendalian mutasi pindah pegawai terutama apabila berorientasi pada dampak adanya penempatan/ pengembangan karier seorang pegawai.
5. Pengembangan SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) : dalam rangka mendukung data yang akurat sebagai bahan kebijakan dan pengambilan keputusan pimpinan menyangkut, Perencanaan, Penempatan, Pengembangan Karier, Kesejahteraan dan sebagainya kepada Pegawai pada setiap SKPD sebagai satu system pengelolaan kepegawaian
6. Kebijakan kesejahteraan pegawai menyangkut reward and punishment.
 - a. Pemberian reward bagi Pegawai berprestasi serta sanksi yang tegas secara adil dan sesuai dengan peraturan dan kewenangan mengingat saat ini dirasa masih belum optimalnya pelaksanaan terhadap kewenangan penjatuhan sanksi bagi pegawai

- b. Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas
 - c. Pemberian bantuan, bagi pegawai aktif yang memerlukan perawatan lanjutan karena sakit
7. Kebijakan Pengiriman diklat struktural terkait dengan penempatan dan jenjang karir pegawai.
 8. Penempatan pegawai mengacu pada prestasi dan karier sangat perlu menjadi perhatian dan komitmen Baperjakat serta prinsip The Right Man on The Right Place. Dengan demikian mutasi dan promosi pegawai memang benar – benar sebagai pemenuhan terhadap pelaksanaan peraturan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan Nasional (BKN) mengenai kepegawaian dalam pelaksanaan dilapangan terkadang terkendala berbagai hal, Kebijakan Propinsi mengenai kepegawaian kurang menguntungkan bagi daerah seperti jadwal Diklat Prajabatan baik Golongan II maupun Golongan III masih ditentukan oleh propinsi sehingga daerah harus menyesuaikan waktu penyelenggaraan diklat dengan propinsi, padahal ini berkaitan dengan ketersediaan dana dan jadwal kegiatan di daerah sendiri. Diklat Prajabatan CPNS Golongan III masih dilaksanakan di Propinsi, padahal jika dilaksanakan di daerah bisa lebih efisien.

Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 merupakan salah satu peraturan yang menjadi titik tolak untuk berubahnya wajah birokrasi di Indonesia. Undang-undang inilah yang diharapkan akan memaksa birokrasi untuk merubah kondisinya yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat karena birokrasi yang dianggap lamban, tambun dan berkinerja rendah. Dampaknya karena adanya penataan sumber daya manusia aparatur agar lebih berkualitas dan professional, di sisi lain situasi anggaran pemerintah saat ini masih terbatas, sehingga Pemerintah melalui Menpan RB mengkaji moratorium (penghentian) perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah dimulai dari tahun 2015 sampai 2019, namun moratorium ini bersifat terbatas. Karena pemerintah masih tetap membuka penerimaan pegawai khusus untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan

- a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan PNS.
- b. Meningkatkan disiplin PNS dan dan pelayanan administrasi kesejahteraan.
- c. Menata dan mengembangkan PNS berbasis kompetensi.
- d. Meningkatkan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah.
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat dan tepat

Sasaran

- a. Tersedianya PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sesuai tuntutan tugas dan fungsinya.
- b. Terwujudnya disiplin PNS dan pelayanan administrasi kesejahteraan.
- c. Terpenuhinya jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi PNS sesuai dengan kebutuhan SOPD/Unit Organisasi.

- d. Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah.
- e. Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat dan tepat.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 2019

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Manajemen ASN yang Profesional	1. Peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	82 %
2	Meningkatkan Manajemen ASN yang Profesional		Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	4,15 %
3	Meningkatkan Manajemen ASN yang Profesional	2. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur sesuai Kompetensi	Persentase Aparatur yang Lulus Diklat dengan Kategori Memuaskan dan Baik	72 %

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2019

A. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Karir
7. Program Pembinaan Aparatur
8. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur

B. Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan peralatan rumah tangga
12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
14. Pengadaan peralatan gedung kantor
15. Pengadaan mebeleur

16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
18. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
20. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22. Penyusunan laporan keuangan semesteran
23. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
24. Penyusunan Rencana Penjurusan Karir
25. Seleksi Pengadaan Calon ASN dan Penempatan
26. Penyelenggaraan Seleksi Ikatan Dinas
27. Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat
28. Penyelesaian Administrasi Hak-Hak Kepegawaian
29. Pemberian Penghargaan Bagi Asn Berprestasi
30. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
31. Pembinaan Jiwa Korps Anggota KORPRI
32. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
33. Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan
34. Seleksi Penetapan Tugas Belajar/ Ijin Belajar Dan Kerjasama Peningkatan SDM Aparatur
35. Pengembangan Teknologi Informasi Data Kepegawaian.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 ini merupakan Rencana Kerja Perubahan tahunan berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pangkalan Bun, 30 Juni 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**Dra. AIDA LAILAWATI. M.Si
NIP. 19680303 198911 2 001**